



# LKPj

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan disampaikan. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama satu tahun anggaran.

LKPj Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, dengan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Laporan ini memuat gambaran umum perangkat daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, capaian kinerja, realisasi anggaran, serta permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dan keterbatasan, baik dari aspek pendanaan, sarana dan prasarana, maupun koordinasi lintas sektor, yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya.

Melalui LKPj ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka perumusan kebijakan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang perhubungan. Rekomendasi yang diberikan akan menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan selama Tahun Anggaran 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Benteng, 24 Februari 2026

Kepala Dinas

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	3
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	4
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	6
<b>BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN .....</b>	<b>8</b>
2.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....	8
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....	8
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama .....	28
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan .....	38
2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .....	48
2.1.5. Inovasi .....	2
2.1.6. Prestasi/Penghargaan .....	6
2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati) yang Diinisiasi Oleh Dinas Perhubungan dan Ditetapkan Oleh Kepala Daerah .....	6
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021 .....	6
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....</b>	<b>8</b>
3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan	8
3.2. Hambatan-Hambatan .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut Dinas perhubungan merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang termasuk dalam Tipe B.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 9 Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, kode pos 92812, memiliki alamat email [dishubkepselayar@gmail.com](mailto:dishubkepselayar@gmail.com) dan akun social media instagram @dishubselayarkab. Dinas Perhubungan terletak pada titik koordinat -6.1186318 Bujur Timur dan 120.4574719 Lintang Selatan.



Foto Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

## **1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

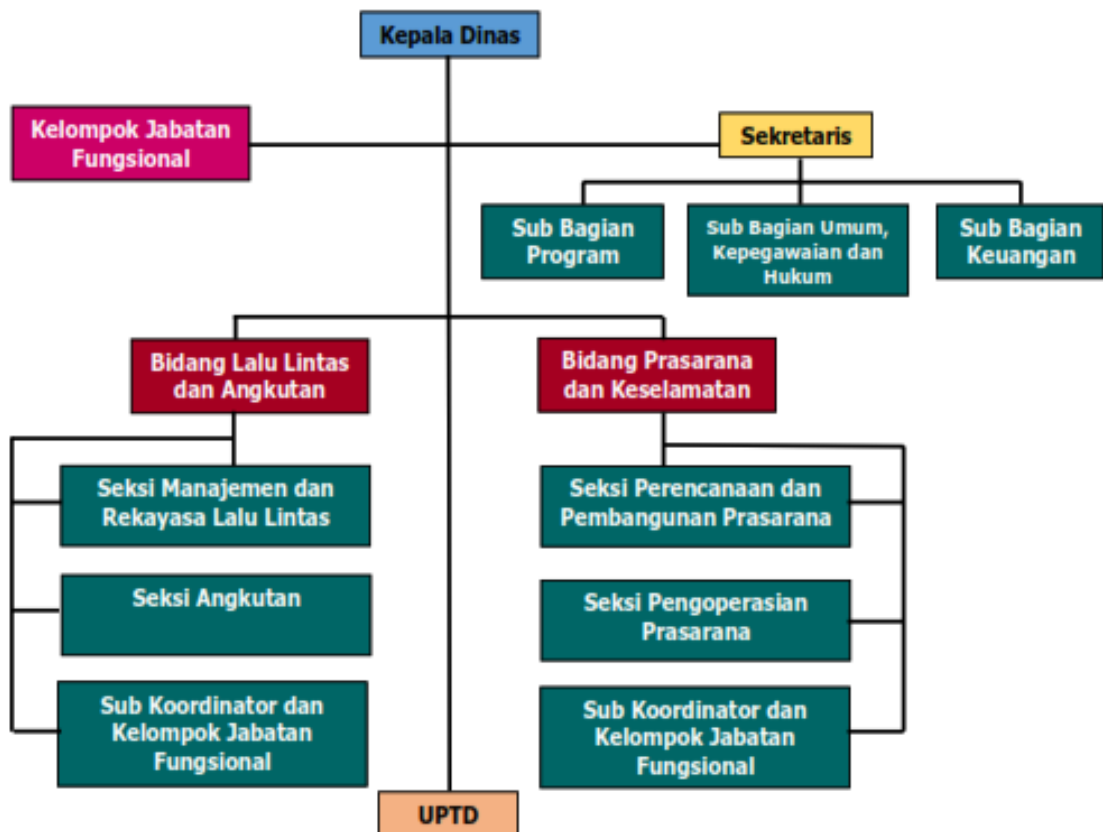
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Program
  - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
  - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - b. Seksi Angkutan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
  - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
  - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;
  - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**



### 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber daya Aparatur Sipil Negara yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 49 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 38 orang dan perempuan sebanyak 11 orang, adapun uraian ASN Dinas Perhubungan sesuai **Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural** sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut tingkat Pendidikan. Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut tingkat pendidikan sebagian besar atau 34,69% berpendidikan S1. Adapun jumlah dan komposisi menurut ASN Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2025 seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1	S2	3	4	7	
2	S1	17	6	23	
3	D3	7	1	8	
4	SLTA	11	0	11	
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	

2. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut Pangkat dan Golongan Ruang. Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut Pangkat dan Golongan Ruang seperti terlihat pada tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kepangkatan Tahun 2025**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Utama Muda	1	0	1	
2	Pembina Tk. I	0	0	0	
3	Pembina	1	2	3	
4	Penata Tk. I	11	2	13	
5	Penata	5	3	8	
6	Penata Muda Tk. I	4	3	7	
7	Penata Muda	11	1	12	
8	Pengatur Tk. I	3	0	3	
9	Pengatur	0	0	0	
10	Pengatur Muda Tk. I	0	0	0	
11	Pengatur Muda	0	0	0	
12	P3K Penuh Waktu	2	0	2	
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	

3. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan sesuai dengan jabatan struktural, seperti pada table berikut :

**Tabel 1.3 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2025**

No.	Eselon	Jumlah Pegawai		Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1	2	3	4	5
1	Eselon IIB (Kepala Dinas)	1	0	
2	Eselon IIIA (Sekretaris)	0	1	
3	Eselon IIIB (Kepala Bidang)	1	1	
4	Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag./Kepala UPTD)	8	2	
5	Eselon IVB (Kasubag. TU)	3	1	
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>5</b>	

Dari 19 (sembilan belas) jabatan struktural yang ada pada Dinas Perhubungan hanya Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang belum memiliki pejabat karena pejabat lama memasuki masa pensiun.



## **BAB II**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **2.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

##### 2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan melakukan pengukuran terhadap capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025, dapat dikatakan berjalan sesuai dengan perencanaan, hal ini tampak dari capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sebagian besar mencapai 100% atau sesuai target, dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan, yaitu 1) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator a) Persentase Capaian Kinerja dan b) Persentase Capaian Kinerja Keuangan, 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LIAJ) dengan indikator a) Kinerja Lalu lintas Kabupaten, dan 3) Program Pengelolaan Pelayaran dengan indikator kinerja a) Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi,

Selain program, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar juga melaksanakan kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan urusan penunjang dengan 23 sub kegiatan serta sebanyak 5 (lima) kegiatan urusan perhubungan dengan 10 sub kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perhubungan	Dinas Perhubungan				11.030.766.300		10.529.693.923			
I			RKPD tahun 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kinerja	100%	Kinerja	95,07%	1) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehingga Penyerapan anggaran rendah pada triwulan awal 2) Proses pengadaan yang memerlukan waktu sehingga Pelaksanaan fisik dan keuangan tidak sesuai jadwal 3) Proses perizinan yang berjenjang yang dapat Menunda realisasi output dan penyerapan anggaran 4) Perubahan regulasi/kebijakan yang membutuhkan Perlunya penyesuaian	1) Penyusunan jadwal kegiatan yang lebih rinci seperti target realisasi keuangan dan fisik ditetapkan per triwulan 2) Percepatan proses pengadaan dengan Persiapan dokumen pengadaan sejak awal tahun 3) Penguatan koordinasi lintas sektor sehingga mampu Mempercepat penyelesaian perizinan dan hambatan teknis	1) telah dilaksanakan pemeliharaan rutin berkala terhadap kendaraan Bus Sekolah sebanyak 3 Unit yaitu DD 7002 J, DD 7006 J dan DD 7023 J pada tahun 2025 sehingga dapat difungsikan sebagai angkutan sekolah gratis.
						100%					
1			DPA Dinas Perhubungan Tahun 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja	3 Dokumen	Kinerja	3 Dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	12.500.000	Alokasi Anggaran (Rp)	11.023.907			
1)				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kinerja	6 Dokumen	Kinerja	6 Dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	3.500.000	Alokasi Anggaran (Rp)	3.236.648			
2)				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kinerja	1 Dokumen	Kinerja	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	1.875.000	Alokasi Anggaran (Rp)	1.484.758			
3)					Kinerja	1 Dokumen	Kinerja	1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Alokasi Anggaran (Rp)	1.375.000	Alokasi Anggaran (Rp)	1.204.440	perencanaan dan pelaksanaan	4) Optimalisasi pengendalian internal guna Menjaga kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan pelaporan	
4)				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kinerja	1 Dokumen	Kinerja	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	1.875.000	Alokasi Anggaran (Rp)	1.637.183			
5)				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kinerja	1 Dokumen	Kinerja	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	1.375.000	Alokasi Anggaran (Rp)	1.144.950			
6)				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja	3 dokumen	Kinerja	3 dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.500.000	Alokasi Anggaran (Rp)	2.315.928			
2				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kinerja</b>	<b>98%</b>	<b>Kinerja</b>	<b>98%</b>			
					<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>4.552.629.000</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>4.395.909.342</b>			
1)				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kinerja	51 Orang	Kinerja	51 Orang			
					Alokasi Anggaran (Rp)	4.547.629.000	Alokasi Anggaran (Rp)	4.391.414.337			
2)				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kinerja	12 Laporan	Kinerja	12 Laporan			
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.500.000	Alokasi Anggaran (Rp)	2.231.851			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kinerja	2 Dokumen	Kinerja	2 Dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.500.000	Alokasi Anggaran (Rp)	2.263.154			
4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kinerja	50%	Kinerja	50%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	34.515.000	Alokasi Anggaran (Rp)	34.478.638			
1)				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kinerja	26 Paket	Kinerja	26 Paket			
					Alokasi Anggaran (Rp)	34.515.000	Alokasi Anggaran (Rp)	34.478.638			
4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kinerja	100%	Kinerja	100%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	338.015.600	Alokasi Anggaran (Rp)	323.870.910			
1)				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja	3 Paket	Kinerja	3 Paket			
					Alokasi Anggaran (Rp)	1.093.100	Alokasi Anggaran (Rp)	1.089.449			
2)				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kinerja	1 Paket	Kinerja	1 Paket			
					Alokasi Anggaran (Rp)	105.700.900	Alokasi Anggaran (Rp)	100.940.387			
3)				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kinerja	3 Paket	Kinerja	3 Paket			
					Alokasi Anggaran (Rp)	18.455.900	Alokasi Anggaran (Rp)	16.685.473			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kinerja	2 Paket	Kinerja	2 Paket			
					Alokasi Anggaran (Rp)	9.185.700	Alokasi Anggaran (Rp)	7.356.601			
4)				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kinerja	5 Dokumen	Kinerja	5 Dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	15.250.000	Alokasi Anggaran (Rp)	14.820.000			
6)				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kinerja	12 Laporan	Kinerja	12 Laporan			
					Alokasi Anggaran (Rp)	19.512.000	Alokasi Anggaran (Rp)	15.258.000			
7)				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kinerja	1 Laporan	Kinerja	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran (Rp)	168.818.000	Alokasi Anggaran (Rp)	167.721.000			
5				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>Kinerja</b>	<b>89,12%</b>			
					<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>574.738.800</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>543.159.996</b>			
1)				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kinerja	12 Laporan	Kinerja	12 Laporan			
					Alokasi Anggaran (Rp)	99.990.000	Alokasi Anggaran (Rp)	85.273.996			
2)					Kinerja	12 Laporan	Kinerja	12 Laporan			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Alokasi Anggaran (Rp)	474.748.800	Alokasi Anggaran (Rp)	457.886.000			
6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja	100%	Kinerja	75%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	394.790.000	Alokasi Anggaran (Rp)	378.703.794			
1)				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kinerja	1 unit	Kinerja	1 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	42.130.000	Alokasi Anggaran (Rp)	41.349.148			
2)				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kinerja	16 unit	Kinerja	16 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	242.670.000	Alokasi Anggaran (Rp)	228.203.946			
4)				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kinerja	2 Unit	Kinerja	2 Unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	9.990.000	Alokasi Anggaran (Rp)	9.160.000			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kinerja	1 unit	Kinerja	1 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	100.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	99.990.700			
II				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja	30,92%	Kinerja	29,14%	1) Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas akibat keterbatasan dana. 2) Perilaku pengguna jalan sendiri seringkali mengurangi kapasitas efektif jalan dengan penggunaan bahu jalan atau badan jalan untuk parkir kendaraan serta aktivitas jual beli yang tumpah ke badan jalan. 3) Belum tersedianya data lalu lintas yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan kebijakan.	1) Komitmen pemerintah daerah berupa dukungan pimpinan daerah terhadap peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas melalui kebijakan dan penganggaran. 2) Tersedianya rambu, marka jalan, APILL, PJU, dan fasilitas keselamatan jalan lainnya. 3) Sinergi antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, Bappeda, PUPR, dan Satpol PP dalam	1) Pemasangan guardrail di Pulau Jampea belum terlaksana karena keterbatasan anggaran dan pertimbangan teknis, namun telah dilaksanakan pada ruas jalan rawan kecelakaan di wilayah daratan Selayar, yaitu Kecamatan Bontomanai, dan akan diusulkan kembali untuk Pulau Jampea pada tahun anggaran berikutnya. 2) pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan telah melaksanakan pembenahan dan pemeliharaan lampu-lampu jalan pada beberapa titik di wilayah kecamatan daratan maupun kepulauan. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai skala prioritas dan ketersediaan anggaran, serta akan dilanjutkan secara bertahap pada titik-titik lainnya
					Alokasi Anggaran (Rp)	1.200.586.000	Alokasi Anggaran (Rp)	1.174.575.849			
1				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja	52%	Kinerja	52,80%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	968.166.000	Alokasi Anggaran (Rp)	952.926.105			
1)				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja	32 unit	Kinerja	32 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	711.447.000	Alokasi Anggaran (Rp)	696.401.750			
2)				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kinerja	17 unit	Kinerja	17 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	256.719.000	Alokasi Anggaran (Rp)	256.524.355			
2				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kinerja	60,61%	Kinerja	51,52%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	14.870.000	Alokasi Anggaran (Rp)	9.881.744			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD			
					6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1)				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kinerja	1 Unit	Kinerja	1 Unit		penanganan lalu lintas.	pada tahun anggaran berikutnya.			
					Alokasi Anggaran (Rp)	14.870.000	Alokasi Anggaran (Rp)	9.881.744						
3				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja	51,50%	Kinerja	50,45%						
					Alokasi Anggaran (Rp)	217.550.000	Alokasi Anggaran (Rp)	211.768.000						
1)				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja	12 Laporan	Kinerja	12 Laporan						
					Alokasi Anggaran (Rp)	17.550.000	Alokasi Anggaran (Rp)	17.550.000						
2)				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kinerja	90 Dokumen	Kinerja	90 Dokumen						
					Alokasi Anggaran (Rp)	200.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	194.218.000						
III				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kinerja	70,50%	Kinerja	46,55%				1) Terbatas anggaran yang ada; 2) Terjadinya Bencana alam yang mengakibatkan	1) Perlu adanya tambahan anggaran untuk prioritas pembangunan Tambatan Perahu;	1) keterbatasan anggaran sehingga hanya dilaksanakan rehabilitasi Tambatan Perahu pada 2 titik lokasi, namun akan ditindaklanjuti melalui pendataan kondisi tambatan
					Alokasi Anggaran (Rp)	3.922.991.900	Alokasi Anggaran (Rp)	3.667.971.487						
1				Penetapan Rencana Induk Dan Daerah	Kinerja	50%	Kinerja	50%						



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>1.172.303.100</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>1.146.505.745</b>	kerusakan pada Tambatan Perahu; 3) Adanya rencana pembangunan tambatan perahu yang dihapus karna sudah ada pelabuhan/laut penyeberangan yang baru	2) Dibutuhkan dukungan dari pengguna jasa dan pemerintah desa/kecamatan terkait	perahu, penyusunan perencanaan teknis, serta pengusulan penganggaran secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan Masyarakat; 2) tidak dilaksanakan di tahun 2025 dan akan di laksanakan pada tahun 2026 melalui penyusunan perencanaan teknis dan pengusulan penganggaran, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 3) belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan karena keterbatasan anggaran, daya listrik yang belum memadai, serta kondisi jalur keluar dan masuk pelabuhan yang masih menggunakan satu pintu/jalur.
1)			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kinerja	3 Dokumen	Kinerja	3 Dokumen				
					Alokasi Anggaran (Rp)	1.172.303.100	Alokasi Anggaran (Rp)	1.146.505.745			
2				<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>Kinerja</b>	<b>60 Unit</b>	<b>Kinerja</b>	<b>59 Unit</b>			
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.750.688.800	Alokasi Anggaran (Rp)	2.521.465.742			
1)				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kinerja	1 Dokumen	Kinerja	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	401.718.000	Alokasi Anggaran (Rp)	381.002.568			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kinerja	2 Unit	Kinerja	2 Unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	1.633.535.000	Alokasi Anggaran (Rp)	1.462.146.745			
3)				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kinerja	1 Unit	Kinerja	1 Unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	592.433.800	Alokasi Anggaran (Rp)	561.287.950			
4)				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kinerja	2 Laporna	Kinerja	2 Laporan			
					Alokasi Anggaran (Rp)	123.002.000	Alokasi Anggaran (Rp)	117.028.479			



Capaian indikator kinerja serta rencana dan realisasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja 1) Persentase Capaian Kinerja dan 2) Persentase Capaian Kinerja Keuangan. Indikator kinerja persentase peningkatan capaian kinerja dengan target kinerja sebesar 100% terealisasi 95,07% atau capaian sebesar kinerja 95,07%, sementara indikator Persentase Capaian Kinerja Keuangan dengan target kinerja sebesar 100% terealisasi 95,46% atau capaian sebesar kinerja 95,46%. Alokasi anggaran pada proram tersebut adalah Rp 5.907.188.400,- atau 53,55% dari alokasi anggaran dan terealisasi sebesar Rp 5.687.146.587,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki indikator Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% atau dengan capaian 100% serta total alokasi anggaran sebesar Rp 12.500.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 11.023.907,- atau 88,19% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja capaian Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun, dari 6 dokumen yang ditargetkan terealisasi 6 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 3.500.000,- terealisasi Rp 3.236.648,- atau 92,48% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD, dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 1.875.000,- terealisasi Rp 1.484.758,- atau 79,19% dari total anggran pelaksanaan sub kegiatan.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD, dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 1.375.000,- terealisasi Rp 1.204.440,- atau 87,60% dari total anggran pelaksanaan sub kegiatan.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD, dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 1.875.000,- terealisasi Rp 1.637.183,- atau 87,32% dari total anggran pelaksanaan sub kegiatan.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD, dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 1.375.000,- terealisasi Rp 1.144.950,- atau 83,27% dari total anggran pelaksanaan sub kegiatan.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari 3 dokumen yang ditargetkan terealisasi 3 dokumen dengan capaian 100%,

sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.500.000,- terealisasi Rp 2.315.928,- atau 92,64% dari total anggaran pelaksanaan sub.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki indikator capaian Persentase Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat Waktu dengan target 100% terealisasi 100% atau dengan capaian 100% serta total alokasi anggaran sebesar Rp 4.552.629.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 4.395.909.342,- atau 96,56% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dari 51 orang yang ditargetkan terealisasi 51 orang dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4.547.629.000,- terealisasi Rp 4.391.414.337,- atau 96,56% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, dari 2 dokumen yang ditargetkan terealisasi 2 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.500.000,- terealisasi Rp 2.231.851,- atau 89,27% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dari 2 dokumen yang ditargetkan terealisasi 2 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.500.000,- terealisasi Rp 2.263.154,- atau 90,53% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki indikator capaian Persentase ASN yang memiliki predikat

kinerja sangat baik dengan target 100% terealisasi 100% atau dengan capaian 100% serta total alokasi anggaran sebesar Rp 34.515.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 34.478.638,- atau 99,89% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan, dari 26 paket yang ditargetkan terealisasi 26 paket dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 34.515.000,- terealisasi Rp 34.478.638,- atau 99,89% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki indikator capaian Persentase pemenuhan Administrasi Umum Kantor dengan target 100% terealisasi 100% atau dengan capaian 100% serta total alokasi anggaran sebesar Rp 338.015.600,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 323.870.910,- atau 95,82% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dari 1 paket yang ditargetkan terealisasi 1 paket dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 1.093.100,- terealisasi Rp 1.089.449,- atau 99,67% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dari 7 paket yang ditargetkan terealisasi 7 paket dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 105.700.900,- terealisasi Rp 100.940.387,- atau 95,50% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dari 4 paket yang ditargetkan terealisasi 4 paket dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang

direncanakan sebesar Rp 18.455.900,- terealisasi Rp 16.685.473,- atau 90,41% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.

- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, dari 2 paket yang ditargetkan terealisasi 2 paket dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 9.185.700,- terealisasi Rp 7.356.601,- atau 80,09% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan, dari 7 dokumen yang ditargetkan terealisasi 7 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 15.250.000,- terealisasi Rp 14.820.000,- atau 97,18% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dari 1 laporan yang ditargetkan terealisasi 1 laporan dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 19.512.000,- terealisasi Rp 15.258.000,- atau 78,20% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari 1 laporan yang ditargetkan terealisasi 1 laporan dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 168.818.000,- terealisasi Rp 167.721.000,- atau 99,35% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% terealisasi 100% atau dengan capaian 100% dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 574.738.800,- dengan realisasi penggunaan

anggaran Rp 543.159.996,- atau 94,51% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan, dari 12 laporan yang ditargetkan terealisasi 12 laporan dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 99.990.000,- terealisasi Rp 85.273.996,- atau 85,28% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan, dari 4 laporan yang ditargetkan terealisasi 4 laporan dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 474.748.800,- terealisasi Rp 457.886.000,- atau 96,45% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator capaian Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dengan target 100% terealisasi 75% atau dengan capaian 75% dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 394.790.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 378.703.794,- atau 95,93% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, dari 1 unit yang ditargetkan terealisasi 1 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 42.130.000,- terealisasi Rp 41.349.148,- atau 98,15% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, dari 20 unit yang ditargetkan terealisasi 20 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 242.670.000,- terealisasi Rp 228.203.946,- atau 94,04% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.

- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara yang ditargetkan 15 unit terealisasi 15 unit, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 9.990.000,- terealisasi Rp 9.160.000,- atau 91.69% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang ditargetkan 1 unit terealisasi 1 unit, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- terealisasi Rp 99.990.700,- atau 99,99% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.

## 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki Indikator kinerja persentase kinerja lalu lintas kabupaten dengan target kinerja sebesar 30,92% terealisasi sebesar 29,14% dengan capaian 94,24%, sementara alokasi anggaran pada proram tersebut adalah Rp 1.200.586.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.174.575.849,- atau 97,83% dari alokasi anggaran dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

### a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota memiliki indikator capaian Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan pada Jalan Kabupaten/kota yang tersedia dengan target 52% terealisasi 52% atau dengan capaian sementara total alokasi anggaran sebesar Rp 968.166.000,- dengan realisasi

penggunaan anggaran Rp 952.926.105,- atau 98,43% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia, dari 32 unit yang ditargetkan terealisasi 32 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 711.447.000,- terealisasi Rp 696.401.750,- atau 97,89% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara, dari 188 unit yang ditargetkan terealisasi 188 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 256.719.000,- terealisasi Rp 256.524.355,- atau 99,9% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.

b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C memiliki indikator capaian Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C dengan target 60,61% terealisasi 51,52% atau dengan capaian 85% sementara total alokasi anggaran sebesar Rp 14.870.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 9.881.744,- atau 66,45% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C dengan indikator kinerja capaian adalah jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi, dari 1 unit yang ditargetkan terealisasi 1 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 14.870.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 9.881.744,- atau 66,45% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.

c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota memiliki indikator capaian Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota dengan target 51,50% terealisasi

51,50% atau dengan capaian 100% sementara total alokasi anggaran sebesar Rp 217.550.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 211.768.000,- atau 97,34% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja capaian adalah jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, dari 1 laporan yang ditargetkan terealisasi 1 laporan dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 17.550.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 17.550.000,- atau 100% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 2) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan indikator kinerja capaian adalah jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota, dari 90 dokumen yang ditargetkan terealisasi 90 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 200.000.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 194.218.000,- atau 97,11% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.

### 3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran, merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan laut yang layak fungsi memiliki indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi dengan target sebesar 70,50% terealisasi sebesar 45,76% atau dengan capaian 64,91% serta alokasi anggaran pada program tersebut adalah Rp 3.922.991.900,- dan terealisasi sebesar Rp 3.667.971.487,- atau 93,50% dari alokasi anggaran dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal memiliki indikator capaian Persentase Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan target 70% dokumen terealisasi 70% atau dengan capaian 100% sementara total alokasi anggaran sebesar Rp 1.172.303.100,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 1.146.505.745,- atau 97,80% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah dokumen Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal, dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 1.172.303.100,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 1.146.505.745,- atau 97,80% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal memiliki indikator capaian Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dengan target 60 unit terealisasi 58 unit atau dengan capaian 96,67% sementara total alokasi anggaran sebesar Rp 2.750.688.800,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 2.521.465.742,- atau 91,67% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 401.718.000,- terealisasi Rp

381.002.568,- atau 94,84% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.

- 2) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun, dari 1 unit yang ditargetkan terealisasi 1 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 592.433.800,- terealisasi Rp 561.287.950,- atau 89,51% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 3) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara, dari 3 unit yang ditargetkan terealisasi 3 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 592.433.800,- terealisasi Rp 561.287.950,- atau 94,74% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.
- 4) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, dari 2 Laporan yang ditargetkan terealisasi 2 Laporan dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 123.002.000,- terealisasi Rp 117.028.479,- atau 95,14% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan.

#### 2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai hasil pelaksanaan pembangunan sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan pelayanan fasilitas umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/Bandara/Terminl per tahun	Orang	Jumlah Orang melalui dermaga/Bandara/ Terminal tahun n	311.173	378.150	121,52
2.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	%	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terpasang dibagi Jumlah Kebutuhan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan dikali 100%	51,41	52,80	102,70
3.	Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah	Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun	Unit	Jumlah Pembangunan Fasilitas Transportasi pada tahun n	3	1	33,33
4.	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun n	70,00 (B)	-	-
5.	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun n-1	70,00 (B)	64,20 (B)	91,71
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		Predikat Hasil Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Tahun n-1	Sesuai	Sesuai	Tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86,00 (B)	-	-

Dari tabel di atas selanjutnya capaian dari masing-masing indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Orang / Barang melalui dermaga / Bandara / Terminl per tahun diperoleh dari Jumlah Orang yang melalui dermaga/Bandara/ Terminal tahun n dimana pada tahun 2025 jumlah penumpang yang melalui pelabuhan, bandara dan terminal yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 378.150 orang sedangkan target kinerja yang direncanakan



adalah sebanyak 311.173 orang sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 121,52%, data jumlah penumpang yang melalui pelabuhan, bandara dan terminal yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.3. Jumlah Penumpang yang Melalui Pelabuhan/Terminal/ Bandara di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

No.	Pelabuhan/Terminal/ Bandara	Jumlah Penumpang		Jumlah	Ket.
		Berangkat	Tiba		
1	2	3	4	5	6
1	Pelabuhan Penyebrangan Pamatata	123.858	119.210	243.068	
2	Pelabuhan Kayuadi	5.678	6.854	12.532	
3	Pelabuhan Jampea	13.362	18.280	31.642	
4	Pelabuhan Bonerate	10.801	11.659	22.460	
5	Pelabuhan Kalaotoa	9.120	9.627	18.747	
6	Pelabuhan Jinato	1.995	2.733	4.728	
7	Terminal Benteng	19.713	20.986	40.699	
8	Bandara H. Aroeppala	2.164	2.110	4.274	
<b>Total</b>		<b>186.691</b>	<b>191.459</b>	<b>378.150</b>	

- Indikator Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan diperoleh dari Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terpasang dibagi Jumlah Kebutuhan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan dikali 100%, dimana pada tahun 2025 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terpasang adalah sebanyak 2.273 unit dari 4.305 unit Kebutuhan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan atau sebesar 52,80% sehingga menghasikan capaian kinerja sebesar 102,70% dari target kinerja sebesar 51,41%. Capaian tersebut diperoleh dari data pemasangan dan kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.1.4 Data Pemasangan dan Kebutuhan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

No.	LOKASI/ KECAMATAN	Rambu Lalu Lintas				Guardrail		Deliniator		Cermin Tikungan		Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		Jumlah		Ket.
		Terpasang	Kebutuhan	Terpasang	Kebutuhan	Terpasang	Kebutuhan	Terpasang	Kebutuhan	Terpasang	Kebutuhan	Terpasang	Kebutuhan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Benteng	119 Unit	46 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	856 Unit	1500 Unit	975 Unit	1546 Unit			
2.	Bontoharu	91 Unit	203 Unit	2 Unit	10 Unit	1 Unit	6 Unit	Unit	1 Unit	262 Unit	500 Unit	356 Unit	720 Unit			
3.	Bontomanai	29 Unit	316 Unit	3 Unit	10 Unit	Unit	2 Unit	Unit	1 Unit	180 Unit	300 Unit	212 Unit	629 Unit			
4.	Buki	2 Unit	110 Unit	2 Unit	1 Unit	Unit	2 Unit	Unit	Unit	137 Unit	325 Unit	141 Unit	438 Unit			
5.	Bontomatene	18 Unit	73 Unit	3 Unit	2 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	377 Unit	525 Unit	398 Unit	600 Unit			
6.	Bontosikuyu	Unit	72 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	183 Unit	300 Unit	183 Unit	372 Unit			
7.	Pasilambena	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	4 Unit	Unit	4 Unit	0 Unit			
8.	Pasimasunggu	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	2 Unit	Unit	2 Unit	0 Unit			
9.	Pasimasunggu Timut	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	2 Unit	Unit	2 Unit	0 Unit			
<b>Total</b>		<b>259 Unit</b>	<b>820 Unit</b>	<b>10 Unit</b>	<b>23 Unit</b>	<b>1 Unit</b>	<b>10 Unit</b>	<b>- Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>2003 Unit</b>	<b>3.450 Unit</b>	<b>2.273 Unit</b>	<b>4.305 Unit</b>			



3. Indikator Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun diperoleh dari Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun pada tahun n, dimana pada tahun 2025 terdapat satu unit pembangunan/pemasangan baru fasilitas transportasi dari 3 (tiga) unit yang ditargetkan yaitu Pembangunan Dermaga Apung (Floating Dock) Kec. Takabonerate Pulau Rajuni sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 33,33%, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.395.635.839. Selain itu sejumlah Rp 521.459.600 dialokasikan untuk rehabilitasi tambatan perahu antara lain Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Batang Kecamatan Takabonerate senilai Rp339.604.800 dan Penambahan Panjang Tambatan Perahu Dusun Letta Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu senilai Rp173.131.000 yang tentunya diharapkan dapat memperpanjang usia pemanfaatan tambatan perahu tersebut sehingga dapat difungsikan dengan maksimal. Sampai dengan tahun 2025 jumlah fasilitas transportasi yang telah dibangun adalah sebanyak 61 unit, 29 unit dalam kondisi baik dan sebanyak 32 unit dalam kondisi rusak. Data fasilitas transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.5 Daftar Fasilitas Transportasi di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

No.	Kecamatan	Dermaga Apung	Tambatan Perahu	Ket.
1	2	3	4	5
1	Pasilambena		8	
2	Pasimarannu		6	
3	Pasimasunggu		7	
4	Pasimasunggu Timur		5	
5	Takabonerate	1	9	
6	Bontosikuyu		11	
7	Bontoharu		8	
8	Benteng			
9	Bontomanai		1	
10	Bontomatene		4	
11	Buki		1	
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>60</b>	

4. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh dari nilai capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun n, namun sejak tahun 2024 tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi sehingga indikator ini tidak memiliki capaian kinerja.
5. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun n-1 dimana pada tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Perhubungan adalah sebesar 64,20 dengan predikat baik sementara target yang direncanakan adalah sebesar 70,00 sehingga capaian kinerja Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebesar 91,71%. Capaian indikator nilai SAKIP Dinas Perhubungan dapat dilihat dari tabel hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.1.6 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		Ket.
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,30	21,30	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	17,40	17,40	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,75	10,50	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,00	15,00	
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>63,45</b>	<b>64,20</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>			<b>B</b>	<b>B</b>	

6. Indikator Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan diperoleh dari Predikat Hasil Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Tahun n-1, dimana realisasi capaian kinerja Laporan Keuangan Dinas Perhubungan tahun 2024 adalah sesuai dengan Standar Akuntansi, hasil ini diperoleh dari Laporan Keuangan Dinas Perhubungan tahun 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disahkan dengan :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



- Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
- 2) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);
  - 3) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 774);

Terbitnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2024, SKPD mengambil Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2024 yang sudah diaudit.
- 2) Aset yang diperoleh dalam tahun anggaran 2024 sesuai belanja tahun anggaran 2024 telah didistribusikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendistribusian ini berdasarkan transaksi tahun anggaran 2024.
- 3) Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri no. 13

tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada Beberapa laporan yang disajikan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri no. 13 tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun anggaran 2024, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu akan dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2024. Beberapa laporan yang disajikan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat dilihat pada table-tabel berikut :

**Tabel 2.1.7 Neraca Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>109.520.942.836,00</b>	<b>112.315.715.252,62</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>207.131.326,67</b>	<b>121.304.841,67</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas	160.929.060,00	18.679.000,00
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	160.929.060,00	18.679.000,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	7.910.266,67	16.810.791,67
1.1.12	Persediaan	38.292.000,00	85.815.050,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>207.131.326,67</b>	<b>121.304.841,67</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>109.228.384.708,33</b>	<b>112.037.718.609,95</b>
1.3.01	Tanah	2.822.320.400,00	2.822.320.400,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	13.507.807.184,95	13.471.407.184,95
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.772.742.390,00	5.772.742.390,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.752.166.005,00	118.128.382.005,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	898.700.000,00	898.700.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.035.736.040,00	1.035.736.040,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(33.561.087.311,62)	(30.091.569.410,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>109.228.384.708,33</b>	<b>112.037.718.609,95</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>85.426.801,00</b>	<b>156.691.801,00</b>
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	0,00	71.265.000,00
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	71.265.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	74.000.000,00	74.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.162.660.301,00	2.162.660.301,00



Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(74.000.000,00)	(74.000.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.077.233.500,00)	(2.077.233.500,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>85.426.801,00</b>	<b>156.691.801,00</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>109.520.942.836,00</b>	<b>112.315.715.252,62</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>228.472.840,00</b>	<b>282.704.023,00</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>228.472.840,00</b>	<b>282.704.023,00</b>
2.1.06	Utang Belanja	8.052.040,00	8.559.523,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	220.420.800,00	274.144.500,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>228.472.840,00</b>	<b>282.704.023,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>228.472.840,00</b>	<b>282.704.023,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>83.372.279.206,00</b>	<b>86.041.555.439,62</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>83.372.279.206,00</b>	<b>86.041.555.439,62</b>
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(9.044.567.374,78)	(11.034.042.884,72)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	5.954.696.770,00	0,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>83.372.279.206,00</b>	<b>86.041.555.439,62</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>83.600.752.046,00</b>	<b>86.324.259.462,62</b>

**Tabel 2.1.8 Laporan Realisasi APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.132.844.000,00</b>	<b>705.410.820,00</b>	<b>62,26</b>	<b>713.745.930,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.132.844.000,00</b>	<b>705.410.820,00</b>	<b>62,26</b>	<b>713.745.930,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	1.132.844.000,00	705.410.820,00	62,26	713.745.930,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.132.844.000,00</b>	<b>705.410.820,00</b>	<b>62,26</b>	<b>713.745.930,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.132.844.000,00</b>	<b>705.410.820,00</b>	<b>62,26</b>	<b>713.745.930,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.703.547.500,00</b>	<b>6.517.857.530,00</b>	<b>97,22</b>	<b>9.899.651.452,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.977.444.100,00</b>	<b>5.803.952.330,00</b>	<b>97,09</b>	<b>8.223.539.302,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	4.518.100.000,00	4.375.410.263,00	96,84	4.250.672.830,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.459.344.100,00	1.428.542.067,00	97,88	3.972.866.472,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>5.977.444.100,00</b>	<b>5.803.952.330,00</b>	<b>97,09</b>	<b>8.223.539.302,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>726.103.400,00</b>	<b>713.905.200,00</b>	<b>98,32</b>	<b>1.676.112.150,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	36.400.000,00	95,78	204.967.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	688.103.400,00	677.505.200,00	98,45	1.468.645.150,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>726.103.400,00</b>	<b>713.905.200,00</b>	<b>98,32</b>	<b>1.676.112.150,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.703.547.500,00</b>	<b>6.517.857.530,00</b>	<b>97,22</b>	<b>9.899.651.452,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(5.570.703.500,00)</b>	<b>(5.812.446.710,00)</b>	<b>104,33</b>	<b>(9.185.905.522,00)</b>

**Tabel 2.1.8 Laporan Operasional Dinas Perhubungan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
7	PENDAPATAN	705.413.320,00	1.271.998.004,00	(566.584.684,00)	(44,54)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	705.410.820,00	785.010.930,00	(79.600.110,00)	(10,14)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	705.410.820,00	785.010.930,00	(79.600.110,00)	(10,14)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>705.410.820,00</b>	<b>785.010.930,00</b>	<b>(79.600.110,00)</b>	<b>(10,14)</b>
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	2.500,00	486.987.074,00	(486.984.574,00)	(99,99)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	2.500,00	486.987.074,00	(486.984.574,00)	(99,99)
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>486.987.074,00</b>	<b>(486.984.574,00)</b>	<b>(99,99)</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>705.413.320,00</b>	<b>1.271.998.004,00</b>	<b>(566.584.684,00)</b>	<b>(44,54)</b>
8	BEBAN	9.749.980.694,78	12.306.040.888,72	(2.556.060.193,94)	(20,77)
8.1	BEBAN OPERASI	5.859.868.422,00	8.215.366.281,67	(2.355.497.859,67)	(28,67)
8.1.01	Beban Pegawai	4.375.410.263,00	4.250.672.830,00	124.737.433,00	2,93
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.484.458.159,00	3.964.693.451,67	(2.480.235.292,67)	(62,55)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>5.859.868.422,00</b>	<b>8.215.366.281,67</b>	<b>(2.355.497.859,67)</b>	<b>(28,67)</b>
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.890.112.272,78	4.090.674.607,05	(200.562.334,27)	(4,90)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	916.837.283,93	993.457.660,05	(76.620.376,12)	(7,71)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	115.366.043,21	115.517.392,00	(151.348,79)	(0,13)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.857.908.945,64	2.981.699.555,00	(123.790.609,36)	(4,15)
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>3.890.112.272,78</b>	<b>4.090.674.607,05</b>	<b>(200.562.334,27)</b>	<b>(4,90)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>9.749.980.694,78</b>	<b>12.306.040.888,72</b>	<b>(2.556.060.193,94)</b>	<b>(20,77)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(9.044.567.374,78)</b>	<b>(11.034.042.884,72)</b>	<b>1.989.475.509,94</b>	<b>(18,03)</b>

**Tabel 2.1.9 Laporan Perubahan Ekuitas Perhubungan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

URAIAN	2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>86.041.555.439,62</b>	<b>87.905.365.202,34</b>
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(9.044.567.374,78)	(11.034.042.884,72)
RK PPKD	5.954.696.770,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	420.594.371,16	9.170.233.122,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>83.372.279.206,00</b>	<b>86.041.555.439,62</b>

7. Indeks Kepuasan Layanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai indikator ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan secara terkoordinasi melalui kerja sama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPKP-LPPM) Universitas Hasanuddin, sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara independen, objektif, dan terukur.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan sebesar 77,40 dari target yang ditetapkan sebesar 65,00, sehingga capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat dan berada dalam kategori **Baik**.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan sebesar 76,61 dari target sebesar 85,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat masih berada dalam kategori **Baik**, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari aspek sarana dan prasarana, kompetensi petugas pelayanan, maupun sistem pelayanan yang lebih efektif dan responsif.

Pada Tahun Anggaran 2025, Survei Kepuasan Masyarakat tidak dilaksanakan karena kegiatan tersebut tidak teralokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, sehingga nilai Indeks Kepuasan Layanan pada tahun pelaporan belum dapat diukur. Dengan tidak tersedianya data hasil survei pada tahun berjalan, maka evaluasi kinerja indikator ini mengacu pada hasil survei tahun sebelumnya serta evaluasi internal terhadap penyelenggaraan pelayanan.

Meskipun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembenahan sistem pelayanan, peningkatan

sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan respons terhadap pengaduan dan masukan masyarakat. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui kerja sama dengan PPKP-LPPM Universitas Hasanuddin akan kembali melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

### 2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan membutuhkan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu program, kegiatan, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja merupakan unsur penting Akuntabilitas Kinerja yang harus dapat diukur secara objektif.

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan urusan perhubungan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.14 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100\%$	7
I	Urusan Perhubungan					
1	Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD					
391	Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	%	30,92	29,14	94,24	



No.	Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100%	7
392	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	%	70,5	46,55	66,03	
393	Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan	%	100	-	-	
	Persentase Capaian Kinerja	%	100	95,07	95,07	
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	%	100	95,46	95,46	
<b>2</b>	<b>Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs</b>					
1	Jumlah Bandara	Unit	1	1	100,00	
2	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Unit	4	7	175,00	
3	Jumlah Pelabuhan Strategis	Unit	7	7	100,00	

Pada tahun 2025 capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan pelayanan urusan pemerintahan bidang perhubungan terdapat dua indikator yang memiliki realisasi capaian melebihi dari target, yaitu :

1. Indikator Jumlah Pelabuhan Penyeberangan dari 4 (empat) unit yang ditargetkan terealisasi 7 (tujuh) unit atau dengan capaian 100%. Capaian terealisasi dimana saat ini Kabupaten Kepulauan Selayar sudah memiliki 7 (tujuh) unit dermaga penyeberangan yang beroperasi, yaitu Dermaga Penyeberangan Pelabuhan Pamatata, Dermaga Penyeberangan Pelabuhan Pattumbukang, dan Dermaga Plensengan Kec. Takabonerate, Dermaga Plensengan Kec. Pasimasunggu Timur, Dermaga Plensengan Kec. Pasimarannu, Dermaga Plensengan Kec. Pasilambena, dan Dermaga Terapung Benteng.

Selain indikator kinerja yang melebihi target terdapat pula indikator kinerja yang memenuhi target, yaitu :

1. Indikator kinerja Jumlah Bandara dari 1 (satu) unit yang ditargetkan terealisasi 1 (satu) unit atau dengan capaian 100%. Capaian ini sama dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya karena bandara yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar baru Bandara H. Aroeppala.

2. Indikator Jumlah Pelabuhan Strategis dari 7 (tujuh) unit yang ditargetkan terealisasi 7 (tujuh) unit atau dengan capaian 100%. Capaian ini sama dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya dimana pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain Pelabuhan Laut Benteng, Pelabuhan Laut Pamatata, Pelabuhan Laut Jampea, Pelabuhan Laut Jinato, Pelabuhan Laut Kayuadi, Pelabuhan Laut Bonerate, dan Pelabuhan Laut Kalaotoa.

Sementara indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah direncanakan adalah :

1. Indikator Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten dengan target kinerja 30,92% terealisasi sebesar 29,14% dengan capaian sebesar 94,24%. Capaian indikator kinerja tersebut diperoleh dari perbandingan antara arus lalu lintas (Q) dengan kapasitas jalan (C) yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam satuan skr/jam. Kinerja lalu lintas Kabupaten Kepulauan Selayar dihitung dari kinerja jalan pada ruas jalan Ki Hajar Dewantara, jalan Kemiri dan Jalan MT. Haryono dengan kondisi masing-masing sebagai berikut :

### Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

No.	Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Lebar Jalur	Lebar Bahu	Pemisah Arah	Volume Jam Puncak			Ukuran Kota (jiwa)	Ciri-Ciri Khusus
						MP	KS	SM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ki Hajar Dewantara	0,4	5	1	50-50	236	71	705	142.100	a) Terdapat satu sekolah dan dua gedung instansi pemerintah; b) Pejalan kaki banyak pada pagi hari dan jam pulang sekolah
2	Kemiri	0,2	5	1	50-50	30	0	584	142.100	a) Terdapat satu sekolah dan satu gedung instansi pemerintah; b) Pejalan kaki banyak pada pagi hari dan jam pulang sekolah
3	MT. Haryono	2,6	6	1	50-50	65	10	529	142.100	a) Terdapat satu gedung instansi pemerintah; b) Terdapat dua warung makan; c) Terdapat satu Coffee Shop and Café; d) Pejalan kaki banyak pada pagi hari dan jam pulang sekolah



Nilai kinerja lalu lintas tersebut diambil dari ruas jalan dengan nilai kinerja tertinggi yaitu jalan Ki Hajar Dewantara sebagaimana data Rincian V/C Ratio di Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tabel berikut :

**Persentase Kinerja Lalu Lintas di Jalan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

Nama Kecamatan	NO	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	FLJ	FC <sub>PA</sub>	FC <sub>HS</sub>	FC <sub>UK</sub>	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	% Kinerja jalan	Level Of Service
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Benteng	1	Ki Hajar Dewantara	0,4	2800	0,56	1	0,96	0,90	395	1355	29,14	B
Benteng	2	Kemiri	0,2	2800	0,56	1	0,96	0,90	356	1355	26,24	A
Benteng	3	MT. Haryono	0,4	2800	0,56	1	0,96	0,90	154	1355	11,39	A
<b>Jumlah</b>									<b>867</b>	<b>4814</b>	<b>18,01</b>	<b>A</b>

Persentase Nilai kinerja lalu lintas Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 adalah 29,14.

- Indikator Persentase Capaian Kinerja Keuangan dengan target kinerja 100,00% terealisasi sebesar 95,46% dengan capaian sebesar 95,46%. Capaian indikator kinerja tersebut diperoleh dari realisasi keuangan tahun 2025 yaitu sebesar Rp 11.030.766.300 dari rencana anggaran sebesar Rp 10.529.693.923. Penyerapan anggaran tersebut mencerminkan efektifitas pengelolaan keuangan serta konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. Adapun sisa anggaran sebesar 4,56% merupakan hasil efisiensi belanja, penyesuaian kebutuhan riil kegiatan, serta optimalisasi penggunaan anggaran dalam rangka mendukung prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik.

Indikator Persentase Capaian Kinerja dari 100% yang ditargetkan terealisasi 95,07% dengan capaian sebesar 95,07%. Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pelaksanaan seluruh kegiatan selama tahun anggaran 2025, selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.1.15 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Unit Penanggung Jawab
				Ke-4 (2025)		Ke-4 (2025)		
				-5	-6	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	K	Rp	K	Rp	-7
<b>I. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah</b>								
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja	100,00%	5.907.188.400	95,07%	5.687.146.587	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan	100,00%		95,46%		
1)		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	12.500.000	100	11.023.907	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	3.500.000	6	3.236.648	DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.875.000	1	1.484.758	DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.375.000	1	1.204.440	DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.875.000	1	1.637.183	DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.375.000	1	1.144.950	DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	2.500.000	3	2.315.928	DINAS PERHUBUNGAN
2)		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	4.552.629.000	100	4.395.909.342	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	4.547.629.000	51	4.391.414.337	DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2.500.000	2	2.231.851	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2.500.000	2	2.263.154	DINAS PERHUBUNGAN
3)		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100	34.515.000	100	34.478.638	DINAS PERHUBUNGAN



No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Unit Penanggung Jawab
				Ke-4 (2025)		Ke-4 (2025)		
				-5	-6	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	K	Rp	K	Rp	-7
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	26	34.515.000	26	34478638	DINAS PERHUBUNGAN
4)		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100	338.015.600	100	323.870.910	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.093.100	1	1.089.449	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	105.700.900	7	100.940.387	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	18.455.900	4	16.685.473	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	9.185.700	2	7.356.601	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	7	15.250.000	7	14.820.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	19.512.000	1	15.258.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	168.818.000	1	167.721.000	DINAS PERHUBUNGAN
5)		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	574.738.800	100	543.159.996	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	99.990.000	12	85.273.996	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	474.748.800	4	457.886.000	DINAS PERHUBUNGAN
6)		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100	394.790.000	75	378.703.794	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	42.130.000	1	41.349.148	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	242.670.000	20	228.203.946	DINAS PERHUBUNGAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	9.990.000	15	9.160.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	100.000.000	1	99.990.700	DINAS PERHUBUNGAN
II.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan							



No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Unit Penanggung Jawab
				Ke-4 (2025)		Ke-4 (2025)		
				K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7		
1.		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>	<b>Kinerja Lalu lintas Kabupaten</b>	<b>30,92</b>	<b>1.200.586.000</b>	<b>29,14</b>	<b>1.174.575.849</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
1)		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	52	968.166.000	52,8	952.926.105	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	32	711.447.000	32	696.401.750	DINAS PERHUBUNGAN
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	17	256.719.000	17	256.524.355	DINAS PERHUBUNGAN
2)		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	60,61	14.870.000	51,52	9.881.744	DINAS PERHUBUNGAN
		Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	1	14.870.000	1	9.881.744	DINAS PERHUBUNGAN
3)		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	51,50	217.550.000	50,45	211.768.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	17.550.000	1	17.550.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rngka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	90	200.000.000	90	194.218.000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>III.</b>	<b>Meningkatnya Fasilitas Transportasi Antarwilayah</b>							
1.		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi</b>	<b>70,50</b>	<b>3.922.991.900</b>	<b>46,55</b>	<b>3.667.971.487</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
1)		Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan (Dokumen)	50	1.172.303.100	50	1.146.505.745	DINAS PERHUBUNGAN
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Dokumen (DLKP) Pelabuhan Pengumpan lokal (Dokumen)	1	1.172.303.100	1	1.146.505.745	DINAS PERHUBUNGAN
2)		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	61	2.750.688.800	61	2.521.465.742	DINAS PERHUBUNGAN



No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Unit Penanggung Jawab
				Ke-4 (2025)		Ke-4 (2025)		
				-5		-6		
-1	-2	-3	-4	K	Rp	K	Rp	-7
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	1	401.718.000	1	381.002.568	DINAS PERHUBUNGAN
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	2	1.633.535.000	2	1.462.146.745	DINAS PERHUBUNGAN
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1	592.433.800	1	561.287.950	DINAS PERHUBUNGAN
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)	2	123.002.000	2	117.028.479	DINAS PERHUBUNGAN
<b>TOTAL</b>					<b>11.030.766.300</b>		<b>10.529.693.923</b>	



#### 2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam menjalankan urusan pemerintahan guna mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan diperlukan kesesuaian antara tingkat penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan besaran capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.16 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=(4/3)*100	7	8	9	10		
1	Urusan Perhubungan										
1.	Dinas Perhubungan	11.030.766.300	10.529.693.923	501.072.377	95,46	4	87,70	10	95,07	33	100,00

Berdasarkan hasil analisis terhadap Tabel 2.1.16, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 berada pada kategori sangat baik. Dari total anggaran sebesar Rp11.030.766.300, realisasi anggaran mencapai Rp10.529.693.923 atau sebesar 95,46%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp501.072.377.

Capaian kinerja program yang diukur melalui 4 indikator kinerja program menunjukkan rata-rata tingkat ketercapaian sebesar 101,25%, yang berarti kinerja program telah melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, capaian kinerja kegiatan yang diukur melalui 10 indikator kinerja kegiatan mencapai rata-rata 95,07%, sedangkan capaian kinerja sub kegiatan yang diukur melalui 33 indikator kinerja sub kegiatan mencapai 100,00%. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan urusan perhubungan antara lain :

- 1) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehingga Penyerapan anggaran rendah pada triwulan awal;
- 2) Proses pengadaan yang memerlukan waktu sehingga Pelaksanaan fisik dan keuangan tidak sesuai jadwal;
- 3) Proses perizinan yang berjenjang yang dapat Menunda realisasi output dan penyerapan anggaran;
- 4) Perubahan regulasi/kebijakan yang membutuhkan Perlunya penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan;
- 5) Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas akibat keterbatasan dana;
- 6) Perilaku pengguna jalan sendiri seringkali mengurangi kapasitas efektif jalan dengan penggunaan bahu jalan atau badan jalan untuk parkir kendaraan serta aktivitas jual beli yang tumpah ke badan jalan.
- 7) Belum tersedianya data lalu lintas yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan kebijakan;
- 8) Terbatas anggaran yang ada;

- 9) Terjadinya Bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas transportasi seperti tambatan perahu;
- 10) Adanya rencana pembangunan tambatan perahu yang dihapus karena sudah ada pelabuhan/laut penyeberangan yang baru.
- 11) Tidak adanya alokasi anggaran dalam rangka penyediaan alat uji kendaraan yang sesuai standar sehingga seluruh angkutan yang ada tidak dapat dilakukan uji secara berkala sesuai dengan surat Dirjen. Perhubungan Darat Nomor : AJ.503/33/7/DRJD/2020, tanggal 17 November 2020, perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Dimana UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar belum terakreditasi dan belum mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji serta belum dilengkapi dengan peralatan utama uji berkala kendaraan bermotor sesuai standar kebutuhan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 16 ayat (2).

#### 2.1.5. Inovasi

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan dua program inovasi yaitu :

##### 1. Selayar Mudik Gratis Tahun 2025 M/1445 H”

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan program Selayar Mudik Gratis ini adalah dapat membantu dan memfasilitasi mahasiswa dan pelajar yang akan mudik sehingga mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik lebaran dengan menggunakan moda transportasi yang lebih aman dan nyaman sehingga diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan pelajar untuk sampai di tujuan dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara/Daerah antara lain adalah :

- 1) PT. Bank Sulselbar Cabang Selayar;
- 2) PT. Bank Perkreditan Rakyat Pesisir Tanadoang;
- 3) PT. Bank BNI Cabang Selayar; dan
- 4) PT. Bank BRI Cabang Selayar.

Disamping partisipasi beberapa Badan Usaha Milik Negara/Daerah, untuk membantu mengidentifikasi dan mendata mahasiswa dan pelajar calon pemudik. Kami membentuk Tim Kordinator sebagai perwakilan yaitu : Awis dan kawan-kawan untuk menyebarkan informasi melalui Media Sosial dan Persuratan ke beberapa kampus yang ada di Makassar. Peserta Mudik ini diidentifikasi berdasarkan tujuan pemberangkatannya yakni Tujuan Selayar (Terminal Bonea Kabupaten Kepulauan Selayar) dan Pulau Terluar Selayar. Adapun pelaksanaan kegiatan Mudik Gratis Tahun 2025 antara lain :

1) Pendataan calon peserta mudik gratis

Pendataan mahasiswa, dan pelajar dilaksanakan sejak tanggal 23 Maret 2025 dengan tujuan pemberangkatan yaitu Tujuan Selayar (Terminal Bonea Kabupaten Kepulauan Selayar) dan ke Pulau-Pulau Selayar. Melalui Link google form online berikut link nya <https://bit.ly/selayarmudikgratis2025> pendaftaran peserta Kegiatan ini dipublikasikan oleh Tim Kordinator sebagai perwakilan yaitu: Awis dan Farhan serta untuk menyebarkan informasi melalui Media Sosial dan Persuratan ke beberapa kampus-kampus yang ada di Makassar, para peserta langsung mendaftarkan dirinya melalui link dengan mengupload foto yang menjadi persyaratan perjalanan yaitu foto KTP, Foto dan Kartu Mahasiswa.

2) Pemberangkatan Perdana dengan tujuan ke Pulau Pulau Kecamatan Kab. Kepulauan Selayar.

Pelaksanaan kegiatan “ Selayar Mudik Gratis Tahun 2025 / 1446 H ”. diberangkatkan perdana pada tanggal 23 Maret 2025 melalui Pelabuhan Makassar Menggunakan Kapal Pelni KM Sabuk 85 Tujuan dari Makassar Ke Kayuadi – Jampea – Bonerate- Jinato – Pasilambena dengan Jumlah Penumpang 159 orang Mahasiswa yang di terima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Selayar saat tiba di Pelabuhan Rauf Rahman Benteng Selayar kemudian dilepas kembali menuju ke Ke Kayuadi – Jampea – Bonerate- Jinato – Pasilambena.

3) Pemberangkatan Kedua

Pemberangkatan kedua ini merupakan pemberangkatan perdana untuk rute Makassar-Selayar yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2025 di Kantor Pusat Bank SULSELBAR Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16

Makassar . Persiapan Pemberangkatan dilakukan pada Pukul 06.00 Wita - 07.00 Wita menggunakan 3 Armada Bus dengan jumlah Peserta Pemudik 240 orang, setelah melakukan registrasi pengecekan dababase peserta mudik pada kordinator pada Pukul 07.30 Wita dilakukan Acara Pelepasan dan Sambutan oleh Bapak Bupati Kepulauan Selayar. H. Muh. Nattsir Ali dan Direktur Bank BPD Sulselbar serta para pimpinan direksi Bank Sulselbar. setelah itu pukul 08.00 dilakukan Pemuatan Penumpang naik ke bus dengan muatan 1 bus berisikan 30 orang penumpang sehinga cukup 3 Bus berisikan 112 orang penumpang, selanjutnya diadakan pemberangkatan perdana “ Selayar Mudik Gratis Tahun 2025 / 1446 H ” dengan secara langsung dilepas oleh H. Muh. Nattsir Ali dan Direktur Bank BPD Sulselbar serta para pimpinan direksi Bank Sulselbar, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Selayar.

#### 4) Pemberangkatan Kedua

Pemberangkatan kedua dilaksanakan pada tanggal 28 April Pukul 07.00 Wita – 09.00 Wita dilaksanakan di area Pelataran Parkir Terminal Malengkeri dengan penumpang yang berjumlah 90 Orang Peserta menggunakan 3 Armada Bus. Penumpang setelah melakukan registrasi dababase perserta mudik kemuadikan naik keatas bus dan meninggalkan pelataran Parkir pada pukul 08.00 wita. pada pukul 12.00 Peserta Tiba Di Pelabuhan Bira untuk menunggu peberangkatan Kapal Fery Ke selayar pada Pukul 14.00 dan Pada pukul 17.00 para peserta mudik sampai di Pelabuhan Pamatata kemudian selanjut diantar ke Terminal Bonea Benteng Selayar.

## 2. Penggunaan QRIS sebagai Metode Pembayaran Pas Masuk Pelabuhan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta mendukung digitalisasi sistem pembayaran daerah, Dinas Perhubungan dalam hal ini UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan inovasi pelayanan publik berupa Metode Pembayaran Pas Masuk Pelabuhan dengan Penggunaan QRIS. Inovasi ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah.

Pelaksanaan inovasi tersebut merupakan hasil kerja sama antara UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata

dengan Bank SulSelBar sebagai penyedia layanan sistem pembayaran non-tunai berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Melalui kerja sama ini, masyarakat pengguna jasa pelabuhan dapat melakukan pembayaran pas masuk pelabuhan secara non-tunai dengan memanfaatkan aplikasi pembayaran digital yang telah terintegrasi dengan sistem perbankan.

Penerapan metode pembayaran QRIS memberikan kemudahan bagi pengguna jasa pelabuhan karena proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. Selain itu, inovasi ini mampu mengurangi antrean di pintu masuk pelabuhan, meminimalkan penggunaan uang tunai, serta menekan potensi kesalahan pencatatan dan kebocoran penerimaan retribusi.

Dari sisi penyelenggara layanan, inovasi pembayaran berbasis QRIS mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pendapatan daerah, karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dipantau secara real time. Data transaksi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pelayanan pelabuhan.

Pelaksanaan inovasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik dan Gerakan Nasional Non Tunai, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya inovasi pembayaran pas masuk pelabuhan menggunakan QRIS, diharapkan pelayanan di Pelabuhan Pamatata semakin tertib, profesional, dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna jasa pelabuhan.

**Tabel 1.4 Program Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

No	Uraian inovasi	Maksud dan tujuan inovasi	Hasil/ manfaat	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Selayar Mudik Gratis Tahun 2025/1446 H	untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya dan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya, sekaligus meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan di jalan raya selama periode angkutan lebaran 2024/1445 Hijriyah.	Mahasiswa dan pelajar dapat mudik secara gratis dan sampai dirumah berkumpul bersama keluarga dengan selamat.	Kerjasama dengan BUMN/ BUMD
2.	Penggunaan QRIS sebagai Metode Pembayaran Pas Masuk Pelabuhan	Meningkatkan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta transparansi pembayaran pas masuk Pelabuhan.	Mengurangi antrean, meminimalkan penggunaan uang tunai, menghindari kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kepuasan Masyarakat.	Kerjasama dengan Bank SulSelBar

### 2.1.6. Prestasi/Penghargaan

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mendapatkan penghargaan.

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati) yang Diinisiasi Oleh Dinas Perhubungan dan Ditetapkan Oleh Kepala Daerah

Pada tahun 2025 tidak ada kebijakan daerah (Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati) yang Diinisiasi Oleh Dinas Perhubungan dan Ditetapkan Oleh Kepala Daerah.

### 2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

Untuk Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.1 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024**

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	merehabilitasi seluruh tambatan perahu di wilayah tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kelancaran lalulintas barang dan jasa dalam rangka kesejahteraan Masyarakat.	dengan keterbatasan anggaran sehingga hanya dilaksanakan rehabilitasi Tambatan Perahu pada 2 titik lokasi, namun akan ditindaklanjuti melalui pendataan kondisi tambatan perahu, penyusunan perencanaan teknis, serta pengusulan penganggaran secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.	Meningkatkan kelancaran lalu lintas barang dan jasa melalui transportasi perairan, menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna tambatan perahu, serta mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat.
2.	memperbaiki jembatan timbang yang ada di Pamatata untuk Peningkatan PAD, dan untuk menetibkan dam truck.	tidak dilaksanakan di tahun 2025 dan akan di laksanakan pada tahun 2026 melalui penyusunan perencanaan teknis dan pengusulan penganggaran, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.	Meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menertibkan operasional dump truck agar sesuai dengan ketentuan muatan, serta mengurangi potensi kerusakan jalan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
3.	melakukan pemeliharaan terhadap semua bus sekolah	telah dilaksanakan pemeliharaan rutin berkala terhadap kendaraan Bus Sekolah sebanyak 3 Unit yaitu DD 7002 J, DD 7006 J dan DD 7023 J pada tahun 2025 sehingga dapat	Menjaga kelayakan dan keselamatan operasional bus sekolah, mencegah kerusakan kendaraan, serta memastikan kelancaran layanan transportasi bagi peserta didik

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		difungsikan sebagai angkutan sekolah gratis.	sehingga mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa.
4.	memasang Barrier Gate (Portal Otomatis) di Pelabuhan Pamatata dalam upaya memaksimalkan PAD	belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan karena keterbatasan anggaran, daya listrik yang belum memadai, serta kondisi jalur keluar dan masuk pelabuhan yang masih menggunakan satu pintu/jalur.	Meningkatkan pengendalian arus keluar masuk kendaraan di area pelabuhan, menertibkan pemungutan retribusi, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel.
5.	memasang Guadrail pada Jalan jalan tertentu yang di anggap rawan terjadi kecelakaan di Jampea.	Pemasangan guardrail di Pulau Jampea belum terlaksana karena keterbatasan anggaran dan pertimbangan teknis, namun telah dilaksanakan pada ruas jalan rawan kecelakaan di wilayah daratan Selayar, yaitu Kecamatan Bontomanai, dan akan diusulkan kembali untuk Pulau Jampea pada tahun anggaran berikutnya.	Meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada ruas jalan rawan kecelakaan, mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta mendukung terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Selayar.
6.	penambahan petugas parkir pada obyek-obyek yang layak untuk dipungut retribusi.	Melakukan penyesuaian dan penguatan penugasan petugas parkir pada lokasi-lokasi parkir yang berpotensi dipungut retribusi. Apabila pada suatu lokasi parkir diperlukan tenaga tambahan, akan diturunkan dukungan petugas sesuai kebutuhan guna memastikan pelaksanaan tugas perparkiran berjalan dengan tertib, optimal, dan sesuai ketentuan.	Meningkatkan efektivitas pengelolaan perparkiran dan optimalisasi penerimaan retribusi parkir, serta mengatasi kekurangan petugas di lokasi tertentu agar pelayanan kepada masyarakat dan pengawasan pemungutan retribusi dapat berjalan dengan baik.
7.	Membenahi semua lampu-lampu jalan.	pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan telah melaksanakan pembenahan dan pemeliharaan lampu-lampu jalan pada beberapa titik di wilayah kecamatan daratan maupun kepulauan. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai skala prioritas dan ketersediaan anggaran, serta akan dilanjutkan secara bertahap pada titik-titik lainnya pada tahun anggaran berikutnya.	Meningkatkan penerangan jalan umum guna mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, mengurangi potensi kecelakaan dan gangguan keamanan pada malam hari, serta menunjang kelancaran aktivitas masyarakat.

### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

### **3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan**

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai bidang urusan perhubungan sebagai berikut :

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1683/X/TAHUN 2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- 2) Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 900/311/X/2025/BPKPD tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 900/267X/2025/BPKPD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

#### **b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diterima dari Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **c. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan :
  - a) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pekerjaan Pembangunan Aerodrome/Floating Dock/Dermaga Apung Kecamatan di Benteng/Takabonerate

#### **d. Anggaran**

APBD tingkat 2 dengan jumlah dana : Rp. 1,600,000,000,- (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

#### **e. Tahapan pelaksanaan kegiatan**

- 1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar membuat Proposal untuk diajukan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
- 2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan verifikasi atas usulan Proposal Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar. hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1683/X/TAHUN 2025 tentang

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025,

- 3) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 900/311/X/2025/BPKPD tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 900/267X/2025/BPKPD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025,
- 4) Kordinasi dan Konsultasi terkait proses Pelaksanaan Kegiatan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
- 5) PPK Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Proses Surat Pesanan pada aplikasi INAPROC 6
- 6) Pelaksana Melakukan Pengiriman barang dan Pemasangan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang didampingi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

**f. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

- 1) Target Kinerja
  - a) Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
    - Program Pengelolaan Pelayaran
      - Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
        - Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
          - Pembangunan Aerodrome/Floating Dock/Dermaga Apung di Benteng/Takabonerate
  - b) Target Anggaran Sebesar Rp. 1,600,000,000,- (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
- 2) Realisasi
  - a) Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 89,37% dengan uraian sebagai berikut :
    - Pembangunan Aerodrome/Floating Dock/Dermaga Apung Benteng/Takabonerate

Tercapai : Pembangunan 100% terlaksana akan di pindahkan ke pulau menunggu cuaca tidak lagi buruk ditahun 2026

- Operasional Pendukung Kegiatan Pembangunan Aerodrome/Floating Dock/Dermaga Apung di Benteng/Takabonerate

Sebagian tercapai : dikarenakan ada yang diluncurkan dan digunakan pada tahun 2026

- b) Realisasi anggaran sebesar Rp. 1,429.902,255,- (Satu miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 89,37%.

**Tabel 3.1.**

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pembangunan Aerodrome/Floating Dock/Dermaga Apung**

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Prasana dan Keselamatan Dinas Perhubungan	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 900/311/X/2025/BPKPD tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 900/267X/2025/BPKPD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.	Program Pengelolaan Pelayaran	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	<u>1.600.000.000</u>	<u>1.429.902.255</u>	89,37		100	
			<b>Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>								
			<b>Pembangunan Aerodrome/ Floating Dock/ Dermaga di Benteng/Takabonerate</b>			<u>1.395.635.839</u>	<u>1.395.436.500</u>		Pembangunan terlaksana		
			<b>Operasional Pendukung Kegiatan Aerodrome/ Floating Dock/ Dermaga Apung</b>								
			Perjalanan Dinas			<u>91.103.000</u>	<u>56.637.245</u>		Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi		
			Pelatihan Teknis Pemasangan dan Pembongkaran			<u>50.000.000</u>	-				Rencana dilaksanakan ditahun 2026
			Sewa Kapal			<u>60.000.000</u>	-				Rencana dilaksanakan ditahun 2026
			ATK dan Penggandaan			<u>3.261.161</u>	-				Rencana dilaksanakan ditahun 2026

### 3.2. Hambatan-Hambatan

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan pembangunan Aerodrome/Floating Dock/Dermaga Apung dalam rangka mendukung konektivitas transportasi dan pelayanan kepada masyarakat menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

1. Keterbatasan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Instansi  
Pelaksanaan kegiatan memerlukan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat keterbatasan sinkronisasi terkait jadwal pelaksanaan, kesiapan lokasi, dan dukungan teknis di daerah.
2. Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah  
Sebagai kegiatan yang bersumber dari Tugas Pembantuan, kewenangan Pemerintah Daerah terbatas pada dukungan administratif dan fasilitasi, sehingga ruang intervensi dalam percepatan pelaksanaan kegiatan relatif terbatas.
3. Kesiapan Lahan dan Aspek Teknis Lokasi  
Pada beberapa lokasi, masih diperlukan penyesuaian kondisi lahan dan kesiapan lokasi, termasuk aspek teknis seperti kondisi geografis, topografi, dan karakteristik perairan yang memerlukan kajian teknis lebih lanjut sebelum pelaksanaan pembangunan.
4. Kondisi Geografis dan Cuaca  
Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki karakteristik kepulauan menyebabkan mobilisasi material dan peralatan konstruksi memerlukan waktu dan biaya lebih besar, serta sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan gelombang laut.
5. Keterbatasan Dukungan Sarana dan Prasarana Pendukung  
Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, seperti akses transportasi, fasilitas pendukung konstruksi, dan peralatan teknis, turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
6. Keterbatasan Anggaran Pendukung di Daerah  
Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan pendukung, seperti koordinasi, monitoring, dan fasilitasi, masih terbatas sehingga mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.

## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, serta sebagai sarana penyampaian informasi kepada Kepala Daerah dan DPRD.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berbagai capaian kinerja telah diraih, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan, meskipun masih terdapat beberapa kendala dan keterbatasan dalam pelaksanaannya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai, serta perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, Dinas Perhubungan terus melakukan upaya perbaikan melalui optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan kualitas perencanaan, serta penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan.

Menindaklanjuti rekomendasi DPRD, Dinas Perhubungan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada tahun-tahun mendatang, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan pengelolaan transportasi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perhubungan. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Akhir kata, Dinas Perhubungan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025. Diharapkan ke depan, kinerja Dinas Perhubungan dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem transportasi yang

lebih baik, aman, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan serta guna mewujudkan “Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur”.

Benteng, 24 Februari 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



^

**Drs. SUARDI, M.M.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19670705 199403 1 020